

Pemprov DKI Imbau Warga Laporkan Pungli Layanan Kependudukan

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau warga melapor jika ada praktik pungutan liar (pungli) yang dilakukan oknum tertentu saat mengurus atau membuat kartu identitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI. Warga bisa melapor melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp ke nomor pengaduan, yakni 08122250781.

“Tolong laporkan ke kami kalau ada pungli dan gratifikasi, karena semua sudah gratis,” kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, di Jakarta Barat, Kamis (25/11).

Lewat pengaduan tersebut, warga bisa memberikan bukti adanya pungutan liar yang dilakukan oknum. Laporan tersebut akan ditindak lanjut ke pihak kepolisian atau kejaksaan agar bisa diproses secara hukum.

Hal tersebut dapat dilakukan lantaran belakangan Pemprov DKI Jakarta sudah bergabung dalam tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bersama instansi penegak hukum lainnya.

“Kita melakukan kerja sama penandatanganan dari Pemprov DKI, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri, dengan Kemenkumham juga disaksikan oleh Menko Polhukam. Jadi memang seluruhnya kita sudah masuk dalam tim,” ujar Budi.

Budi berharap keberadaan Satgas Pungli ini dapat memberikan rasa aman kepada warga yang tengah

mengurus administrasi dokumen di Sudin Dukcapil DKI.

Sebelumnya, Satgas Saber Pungli terus melakukan pengecekan lokasi pelayanan publik termasuk di DKI Jakarta untuk mencegah pungutan liar.

“Nah tentunya ini harus didukung, karena apabila ini tidak diberikan atau tidak dicek secara langsung tentunya akan menjadi simbol belaka. Jadi harus cek pelayannya, walaupun sekarang sistemnya ‘online’ tapi harus benar-benar beroperasi,” kata Sekretaris Satgas Saber Pungli Irfan Pol Agung Makbul saat meninjau Mal Pelayanan Publik di DKI Jakarta, Senin lalu.

Menurut dia, langkah itu merupakan komitmen satuannya untuk memastikan setiap unit pelayanan publik bebas dari pungli sehingga tidak hanya sebagai simbol belaka tetapi juga hal itu harus benar-benar diaplikasikan. Satgas Saber Pungli dibentuk berdasarkan Instruksi Presiden RI pada 2016 atau sudah berlangsung sekitar lima tahun ditujukan untuk menindak dan mengawasi pelayanan publik.

“Pokoknya semuanya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik,” tutur dia.

Makbul juga mempersilakan masyarakat umum untuk turut mengawasi dan langsung melaporkan ke Satgas Pungli apabila ada informasi temuan pungutan liar di mal pelayanan publik maupun di gerai layanan publik. ● yan



FOTO: ANI

PELUNCURAN LAYANAN ASURANSI DAN KESEHATAN DIGITAL AXA MANDIRI

Seorang nasabah menunjukkan aplikasi Emma, layanan asuransi dan kesehatan digital menyeluruh satu pintu dari AXA Mandiri dan AXA di Jakarta, Kamis (25/11). Peluncuran Emma dengan tagline “Teman Sejat!” atau “Teknologi Mudah dan Nyaman untuk Sehat juga Terlindungi” merupakan bagian dari komitmen AXA Group untuk menjadi pemimpin dalam transformasi digital dalam bisnis proteksi dan kesehatan.

Pengelola Terminal Kalideres Minta Biaya Antigen Digratiskan

JAKARTA (IM) - Kepala Terminal Kalideres, Revi Zulkarnaen mengharapkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menggratiskan biaya tes antigen untuk penumpang saat penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 termasuk pengadaan Posko “Ramp Check” untuk pemeriksaan armada dan pengemudi.

“Yang kita cek itu sistem yang ada di kendaraan jadi ada sistem rem, sistem kemudi, sistem roda, sistem lampu kita periksa semua,” tutur Revi.

Kemudian, pihaknya juga telah mempersiapkan posko pengamanan terpadu dan kesehatan pada beberapa titik di lokasi terminal. Dengan persiapan tersebut, Revi berharap aktivitas di terminal tetap berjalan sesuai protokol kesehatan saat PPKM level tiga serentak di seluruh wilayah Indonesia. ● yan

“Jadi penumpang tidak perlu kucing-kucingan lagi dengan petugas,” ujar Revi. Terlepas dari itu, Revi mengaku pihaknya sudah melakukan beberapa persiapan jelang pemberlakuan PPKM level 3 termasuk pengadaan Posko “Ramp Check” untuk pemeriksaan armada dan pengemudi.

Menurut Revi, layanan antigen gratis dapat mempermudah warga untuk naik bus lewat terminal yang resmi, sehingga petugas dapat meminimalisir keberadaan

Uji Coba Ganjil Genap Jalan Margonda Depok Digelar Desember

DEPOK (IM) - Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Metro Depok, Kompol Jhoni Eka Putra mengatakan uji coba kebijakan pembatasan kendaraan bermotor berdasarkan nomor ganjil dan genap di sepanjang Jalan Margonda Raya Kota Depok akan digelar selama dua hari.

“Iya dua hari. Itu kami rencanakan uji coba ganjil genap tanggal 4 dan 5 Desember 2021,” kata Jhoni, Kamis (25/11).

Menurut dia, saat penerapan uji coba ganjil genap tidak memberikan tindakan kepada pengendara roda empat jika melintasi Jalan Margonda tidak sesuai dengan

pelat nomor pada hari itu. “Imbauan saja. Ganjil genap berlaku dari pukul 12.00 – 18.00 WIB,” ungkapnya.

Jhoni menjelaskan, pihak kepolisian masih melihat kondisi lapangan jika sosialisasi ganjil genap di Margonda sudah selesai. Nantinya akan hasilnya akan dievaluasi pasca uji coba tersebut berhasil apakah tidak.

“Sistem ganjil genap ini diterapkan untuk mengontrol volume kendaraan yang melintas di Jalan Margonda. Terlebih pada akhir pekan kemacetan kerap terjadi di jalan penghubung ke wilayah Jakarta tersebut,” tegasnya. ● yan

4 | Metropolis

IDN/ANTARA



BLUE BIRD SIAPKAN KENDARAAN UMUM RAMAH LINGKUNGAN

Pengunjung melihat armada angkutan umum Blue Bird yang menggunakan Toyota Prius Plug-In Hybrid Electric Vehicle (PHEV) di ajang Pameran Indonesia Electric Motor Show 2021 di Puspipetek, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (25/11). Emiten transportasi PT Blue Bird Tbk rencananya hingga tahun 2025 akan menghadirkan taksi listrik sebanyak 10 ribu unit sebagai kendaraan umum ramah lingkungan.

Pemprov DKI Berencana Relokasi Warga Terdampak Rob ke Rusun

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengatakan, pihaknya akan mengkaji target jumlah kepala keluarga (KK) atau warga terdampak rob yang potensial untuk direlokasi, karena tidak semuanya bisa dipindahkan sekaligus.

JAKARTA (IM) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana merelokasi warga yang terdampak rob pada sejumlah lokasi di Jakarta Utara ke beberapa rumah susun (rusun). “Jadi memang terkait banjir rob itu ada beberapa solusi, memang di antaranya nanti yang bila dimungkinkan itu bisa direlokasi ke rusun

yang sudah ada, yang sudah terbangun,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Kamis (25/11).

Riza menambahkan pihaknya akan mengkaji target jumlah kepala keluarga (KK) atau warga terdampak rob yang potensial untuk direlokasi karena tidak semuanya bisa dipindahkan sekaligus. Ia

menyebut tim bentuk dari Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara akan mengkoordinasikan rencana relokasi warga yang akan direlokasi, pihaknya juga mengkaji rusun yang akan disasar sebagai tempat untuk relokasi warga terdampak rob.

“Nanti sedang dikaji bera-pa yang akan kondisinya memungkinkan untuk diterima, ditampung, nanti ada tim yang mengkoordinasikan melalui Wali Kota Jakarta Utara,” ucap Riza. Di sisi lain, Riza meminta warga untuk bersabar karena saat ini pemerintah pusat dan Pemprov DKI sedang melaksanakan program pembuatan

tanggul melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). “Terus kita membuat tanggul untuk bisa mengurangi, menghadang banjir rob yang selalu datang di musim hujan ini. Memang ini membutuhkan waktu dan membutuhkan biaya tidak sedikit, mohon semuanya bersabar,” ujar Riza.

Beberapa waktu lalu rob melanda sejumlah titik di Jakarta Utara di antaranya menimpa sekitar 300 Kepala Keluarga (KK) pada enam RT yang berada di RW 022 Pluit, Penjaringan, kawasan Ancol, dan Muara Angke Jakarta Utara.

Tanggul yang telah dikerjakan sepanjang 13 kilometer dari target 33,2 km terbagi menjadi dua, yakni Kementerian PUPR sepanjang 10,8 km dan Pemprov DKI Jakarta sepanjang 22,4 km. Pada 2021, Kementerian PUPR mengerjakan tanggul sepanjang 3,8 kilometer. ● yan

Venue Formula E Ditentukan Jokowi, Wagub DKI: Bentuk Perhatian Pusat

JAKARTA (IM) - Presiden RI Joko Widodo disebut akan menentukan lokasi venue Formula E di Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menganggap hal tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah pusat terhadap ajang balap mobil listrik.

“Memang kalau ada keinginan pemerintah pusat untuk terlibat aktif tentu kami sangat senang dan bersyukur. Itu artinya pemerintah pusat memberi perhatian yang lebih perhatian yang baik kepada penyelenggaraan karena ini tidak hanya menyangkut nama baik kota Jakarta tapi sesungguhnya juga ini menyangkut nama Indonesia, tentu bapak presiden memberi perhatian yang baik. Kami berterima kasih dan bersyukur,” kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (25/11).

Riza mengatakan, Jakpro telah menunjuk 5 lokasi calon sirkuit Formula E. Langkah selanjutnya yaitu FEO bersama Jakpro melakukan peninjauan dan pengecekan sesuai spesifikasi yang ditetapkan, baik bagi pembalap maupun penonton saat ajang Formula E.

“Sesuai aturan ketentuan perwakilan dari Formula E yang melakukan pengecekan, penelitian karena ada syarat-syarat harus dipenuhi. Tidak hanya syarat-syarat tentang keamanan bagi pengendara bagi Formula E tapi juga keamanan bagi pengunjung dan tentu juga harapan kita,” jelasnya. Terakhir, Politikus Gerindra itu menyatakan lokasi yang ditentukan tak hanya sekedar menunjukkan ikon Ibu Kota. Melainkan memperlihatkan kemajuan kota Jakarta yang menjangkau nama baik Indonesia.

“Tempat ditunjuk itu nanti menjadi ikon supaya nanti di dunia, kota Jakarta itu bisa dilihat seluruh warga dunia. Bagaimana perkembangan kota Jakarta yang kita banggakan, kita cintai. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi,” imbuhnya.

Sebelumnya, Co-Founder Formula E, Alberto Longo mengatakan venue balap mobil listrik di Jakarta akan diumumkan sebelum Natal. Presiden Jokowi disebutkan akan menentukan venue Formula E Jakarta. Alberto juga mengatakan saat ini lima calon venue balap Formula E Jakarta masih ta-

hap uji kelayakan. Lima calon sirkuit itu antara lain di wilayah Sudirman, PIK, kawasan dekat Stadion JIS, JIExpo Kemayoran, dan Ancol.

“Jadi kita akan melakukan semacam feasibility study untuk di lima lokasi ini terlebih dahulu sebelum nanti diumumkan sebelum Natal dan mudah-mudahan sebelum Natal sudah ada keputusannya. Kita akan melanjutkan proposal kepada Presiden Republik Indonesia dan beliau yang akan mengambil keputusan,” ujar Alberto, dalam jumpa pers, Rabu (24/11) malam.

“Ada banyak sekali lokasi yang bagus. Terlalu banyak opsi yang baik. Ada lima lokasi yang berbeda beda yang tapi bukan yang terlarang, yang tadi bapak Bambang Soesatyo sebutkan,” katanya.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI), Bambang Soesatyo (Bamsot) menuturkan lima calon venue balap itu akan diajukan ke Presiden Jokowi.

“Jadi ada 5 yang kita ajukan ke Presiden. Kira-kira mana yang beliau sarankan, plus-minus dari wilayah-wilayah,” ujar Bamsot dalam jumpa pers. ● yan

Pemprov DKI Diminta Hapus Anggaran TGUPP pada RAPBD 2022

JAKARTA (IM) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus anggaran untuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2022.

Pasalnya, menurut Gembong, peran TGUPP pada masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi sangat sentral dan mengganggu ruang gerak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Peran TGUPP sangat sentral yang mengakibatkan ruang gerak para SKPD terganggu dengan hadirnya TGUPP. Rasanya tidak elok, seorang pejabat pemprov, kepala dinas membuat surat sampai ditubuhkan kepada TGUPP. Karenanya, kami rekomendasikan, sebagaimana kami bahas di Komisi A, alokasi anggaran TGUPP yang jumlahnya Rp19,8 Miliar untuk dihapus, dinolkan,” kata Gembong yang juga anggota Komisi A ini, kemarin.

Lebih lanjut, Gembong menuturkan sebaiknya anggaran TGUPP dialihkan ke program yang bermanfaat langsung buat warga Jakarta. Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko menjelaskan anggaran

untuk TGUPP mencapai Rp 19 miliar pada 2021.

Realisasi hingga November 2021 anggaran TGUPP yang tersebar mencapai Rp15,9 miliar, Namun Sigit mengatakan ada penurunan jumlah pagu anggaran pada 2022 dibanding 2021.

“Dari 2021 ke 2022 ada penurunan jumlah pagu anggarannya. Karena kita tentu melihat proses evaluasinya, baik itu jumlah grading maupun jumlah anggota TGUPP itu sendiri,” tutur dia.

Saat ini, Sigit menurutkan jumlah personel TGUPP ada 74 orang dan Ketua TGUPP mendapat kedudukan dan keuangan setara peringkat 15. Sedangkan tunjangan kinerja daerah dan fasilitas lainnya setara eselon II.

“Kepada Wakil Ketua TGUPP diberikan hak dan keuangan setara peringkat 14, tunjangan kinerja daerah setara eselon II,” tutur Sigit.

Sedangkan, anggota TGUPP diberikan kedudukan dan keuangan setara peringkat 13 tunjangan kinerja daerah setara eselon II.

“Kepada tenaga ahli dan asisten yang ditugaskan oleh TGUPP diberikan honor dan kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kita bicara tentang tunjangan kinerja daerah tentu bersumber dari APBD,” ujarnya. ● yan

Wali Kota Jaktim Harap Hasil Panen Bantu Cegah Stunting

JAKARTA (IM) - Wali Kota Jakarta Timur, Muhammad Anwar berharap agar hasil panen raya pertanian kota pada 74 lokasi membantu pemenuhan gizi anak sehingga mencegah kasus stunting.

Anwar mengatakan hasil panen raya sebanyak 1.132 kilogram itu terdiri atas sayur mayur dan perikanan, seperti kangkung, pakcoy, caisim, ubi, jagung, terong, cabai, tanaman obat keluarga, ikan lele, serta nila. “Diharapkan dapat memenuhi kebutuhan gizi untuk percepatan penuntasan anak stunting dan menjadi bagian dalam penguatan ketahanan pangan,” kata Muhammad Anwar di Jakarta, Kamis (25/11).

Anwar menambahkan wilayah Jakarta Timur pada 2019 menduduki posisi tertinggi balita yang menderita stunting (gangguan pertumbuhan tubuh) atau kerdil dengan kategori pendek se-

banyak 4.857 anak balita. Anwar mengatakan pihaknya masih berupaya menyelesaikan masalah anak stunting atau gangguan pertumbuhan secara fisik dan kemampuan intelektual anak.

Lebih lanjut terkait hasil panen raya, dia menginginkan jajaran Pemkot Jakarta Timur dapat mendistribusikan hasil panen raya ke warga yang membutuhkan, sisanya dijual untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Menurut Anwar, pertanian kota yang memanfaatkan lahan sisa di kantor Kelurahan, Kecamatan, RPTRA, dan lahan tidur sudah menghasilkan banyak manfaat bagi masyarakat. “Sayur yang dipanen di lahan urban farming ini sehat karena tanpa pestisida. Sehingga aman dikonsumsi karena tidak terpengaruh bahan zat kimia berbahaya,” ujar Anwar. ● yan

IDN/ANTARA



PEMENTASAN MEREKA YANG MENUNGGU DI BANDA NAIRA

Aktor Reza Rahadian sebagai Sutan Sjahrir beradu peran dengan Aktris Julia Estelle sebagai Maria Duchtaeu pada pementasan teater “Mereka Yang Menunggu Di Banda Naira” di Gedung Kesenian Jakarta, Jakarta, Rabu (24/11). Pementasan yang berkisah tentang pertemuan empat tokoh pergerakan Indonesia yaitu Sutan Sjahrir, Mohammad Hatta, dr.Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Iwa Koesoema Soemanteri di Banda Naira tersebut akan ditayangkan secara virtual selama 6 bulan di kanal YouTube IndonesiaKaya.